UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia, Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimalia Press, Aceh.

Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Badzulraman, Mariam Darus, *et al*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badrulzaman, Mariam Darus, 2005, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan Cet. ke-2*, Alumni, Bandung.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok.

Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S, Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.S, Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.S, Salim, 2017, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdi, Asep Saepul, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan.* Deepublish, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hardjomuljadi, Sarwono, et al., 2008, *Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi MDB Harmonised Edition bagi Bangunan dan Pekerjaan Enjiniring dengan Desain oleh Pengguna Jasa*, FIDIC, INKINDO, dan LPJK.

Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hernoko, Agus, Y., 2008, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama,Yogyakarta.

International Chamber of Commerce, 2020 , *ICC Force Majeure and Hardship Clauses*, ICC Publishing S.A., Paris.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2014, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Cet. ke-6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata* Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung.

Rahardjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*, Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio, J, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjutak, Ricardo, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta.

Sekaran, Uma, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, Jakarta.

Setiawan, R, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Bebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soenandar, Taryana. *et al*., 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soemadipradja, Rahmat S.S, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia, Jakarta.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Cet. ke-6, Alumni, Bandung.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan 28*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cet. ke-29*, Internusa, Jakarta.

Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian* Cet. ke-21, Internusa, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya* Cet. ke-3, Bumi Aksara, Jakarta.

Suryodiningrat, R.M., 1995, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Huku,* Mandar Maju, Bandung.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Anggi Nidya Sari dan Viktor Suryan, "*Pandemi Covid-19: Dampak terhadap Pekerjaan Konstruksi*", Jurnal Talenta Sipil, Vol.4, No.2, 2020.

Arini, Annisa Dian, "*Pandemi Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis*", Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1, Juni 2020.

Brahmana, Herman, *et al.*, "*Eskalasi dan Force Majeur dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*", USU Law Journal, Vol. 3, No.2, 2015.

Elias, Hary, *et al*., "*Penerapan Financial Hardship dalam Putusan Pengadilan Indonesia*", ACTIO ISSUE No. 13 *Force Majeure*, Juni 2020.

Kharisma, Dona Budi, "*Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure*", Jurnal RechtsVinding, Juni 2020.

Gandhi, Swata J, "*Force Majeure And Contracting Strategies For The Covid-19 Era*", The Practical Lawyer, Miles and Stockbridge, 2021.

Heliany, Ina dan Edison H.Manurung, "*Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi di Indonesia*", Jurnal UMJ: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (online), E-ISSN: 2714-6286. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat, 2020.

Hernoko, Agus Yudha, "*Force Majeur Clause Atau Hardship Clause Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis*", PERSPEKTIF, Vol. 11, No.3, Juli 2006.

Hidayat, Felix, *et al*., "*Analisis Perbandingan Dampak Pandemi Covid-19 pada Kontraktor Berskala Besar dan Kecil di Kota Jabodetabek*", Konferensi Nasional Teknik Sipil *15*, Oktober 2021.

Kaya, P.B.T.A, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "*Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 6, 2020.

Kuahaty, Sarah S., "*Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*", Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.

Maelissa, Nelda, *et al*., "*Dampak Pandemi Covid-19 bagi Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kota Ambon*", Jurnal Simetrik, Vol.11, No. 1, Juni 2021.

Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "*Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, April 2020.

Nugraheni, Ninis, *et al*., "*Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Berlakunya Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*", Jurnal Hukum Padjajaran Jilid 7, No. 2, 2020.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pramono, Nindyo, "*Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*", Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Vol.22, No.2, 2010.

R, Nugraha dan Ma'ruf Hafidz, "*Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia*", Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No.3, Maret 2021.

Rasuh, Daryl John, "*Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Lex Privatum, Vol. 4, No. 2, Februari 2016.

Thalib, Mutia Cherawaty dan Barry Yusuf Labdul, 2019, "*Kontrak Kerja Konstruksi: Antara Hukum Privat dan Hukum Publik"*, Paper, Universitas Negeri Gorontalo, Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI.

Thamrin, Husni, "*Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer*," Jurnal Ilmu Hukum The Juris II, No. 1, 2018.

Safira, Afifah, *et al*., "*Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, No.1, Tahun 2021.

Sahruddin, *et al*., "*Tanggung Jawab atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan sebagai Akibat dari Terjadinya Force Majeure"*, Jurnal Risalah Kenotariatan,Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

Siregar, F.Y.D., "*Pandemi Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", Nomoi Law Review, Vol.1, No. 1, Mei 2020

Situmeang, Sahat Maruli Tua, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Good Governance",* diakses dari http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_114030413868.pdf pada tanggal 10 Oktober 2021.

Sufiarina dan Sri Wahyuni, "*Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19*", Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No.1, Juni 2020.

Skripsi

Agusta, Reza Aldo, 2020, *Tanggung Jawab Penyedia Jasa atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Makalah

Suparman, Eman, "Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa", *Makalah*, Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademik RUU Pengadaan Dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor LKPP, Jakarta, 20 November 2014.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Internet
Artikel

(https://covid19.go.id)

Aida, Nur Rohmi, "Update, Berikut 15 Negara yang Berlakukan Lockdown akibat Virus Corona", *https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all*, diakses 02 September 2021.

Amalia, Yunita, "Dinas Bina Marga DKI Sebut Anggaran Revitalisasi Stasiun Terpangkas Akibat Covid", *https://www.merdeka.com/jakarta/dinas-bina-marga-dki-sebut-anggaran-revitalisasi-stasiun-terpangkas-akibat-covid.html,* diakses 16 November 2021.

Andy, Hannif, "Protokol Kesehatan di Lokasi Proyek Konstruksi saat Memasuki New Normal", *https://eticon.co.id/protokol-kesehatan-proyek-konstruksi/*, diakses 02 September 2021.

Arief, Andi M., "Anggaran Merosot, Kementerian PUPR Tunda Pembayaran Sebagian Proyek Air Minum", *https://ekonomi.bisnis.com/read/20210923/45/1446083/anggaran-merosot-kementerian-pupr-tunda-pembayaran-sebagian-proyek-air-minum,* diakses 16 November 2021.

Balai Diklat Keuangan Manado, "Peristiwa Kompensasi dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-manado-peristiwa-kompensasi-dalam-kontrak-pengadaan-barangjasa- Pemerintah-2019-11-05-c1ca3ea0/*, diakses 20 Desember 2021.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, "Kementerian PUPR Lakukan Realokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sebesar Rp24,53 Triliun dan Refocussing Kegiatan Dukung Penanganan Covid-19", *https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lakukan-realokasi-anggaran-pembangunan-infrastruktur-sebesar-rp-24-53-triliun-dan-refocussing-kegiatan-dukung-penanganan-covid-19.*

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, "Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2021 Difokuskan Pada 5 Sektor Prioritas", *https://www.pu.go.id/berita/dukung-pemulihan-ekonomi-nasional-pembangunan-infrastruktur-pupr-tahun-2021-difokuskan-pada-5-sektor-prioritas,* diakses 27 November 2021.

Bizlaw, "Pandemi COVID-19: Bisakah Menjadi Force Majeure?", *https://bizlaw.co.id/pandemi-covid-19-bisakah-menjadi-force-majeure/,* diakses 20 Oktober 2021.

Christiawan, Rio "Covid-19 (Bukan) Force Majeure?", *https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/60f16a96696dc/covid-19-bukan-force-majeure*, diakses 19 November 2021.

Cinta, "Proyek Peninggalan AMS-TSY di Bulukumba Dihentikan", *https://www.alur.id/proyek-peninggalan-amstsy-di-bulukumba-dihentikan,* diakses 16 November 2021.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Denny Satriyawan, "Perubahan Kontrak Tahun Tunggal menjadi Kontrak Tahun Jamak", *[h]ttps://kppnmetro.org/2020/09/perubahan-kontrak-tahun-tunggal-menjadi-kontrak-tahun-jamak-s-510/,* diakses 24 September 2021.

Dimas, "Terdampak Refocusing, Pembangunan Wisma Atlet Sidoarjo Bakal Terhenti Lagi Tahun ini", *https://sidoarjonews.id/terdampak-refocusing-pembangunan-wisma-atlet-sidoarjo-bakal-terhenti-lagi-tahun-ini/,* diakses 16 November 2021.

Dinas PUPR Provinsi Banten, "Penundaan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan pada Masa Pandemi", *https://dpupr.bantenprov.go.id/post/pers-release-penundaan-pelaksanaan-pekerjaan-konstruksi-dan-konsultan-pada-masa-pandemi,* diakses 24 September 2021.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, "Produk Hukum Instruksi Dalam Negeri", *https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/halaman/detail/instruksi-menteri-dalam-negeri*, diakses 02 September 2021.

Fawaidi, Ach., "18 Pekerja Positif Covid-19, Proyek Renovasi Stadion I Wayan Dipta Dihentikan Sementara", *https://regional.kompas.com/read/2021/06/21/154256078/18-pekerja-positif-covid-19-proyek-renovasi-stadion-i-wayan-dipta?page=all,* diakses 15 November 2021.

Febriani, Ririn Nur, "Terdampak anggaran untuk Covid-19, Pembangunan Underpass Sriwijaya Ditunda", *https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01390072/terdampak-anggaran-untuk-covid-19-pembangunan-underpass-sriwijaya-ditunda,* diakses 24 September 2021.

Gibson, Dunn, dan Crutcher LLP, "Force Majeure Clauses: A 4-Step Checklist & Flowchart", *https://www.gibsondunn.com/force-majeure-clauses-a-4-step-checklist-and-flowchart/,* diakses 02 November 2021.

Gunawan, Arif, " Pemerintah Realokasi Anggaran Proyek, Laba Kontraktor Terganggu",*https://ekonomi.bisnis.com/read/20200720/45/1268569/ Pemerintah-realokasi-anggaran-proyek-laba-kontraktor-terganggu,* diakses 24 September 2021.

Hantoro, Juli, "Proyek Infrastruktur Hampir Mangkrak di DKI Ini Rampung Setelah Dapat Dana PEN", *https://metro.tempo.co/read/1497688/proyek-infrastruktur-hampir-mangkrak-di-dki-ini-rampung-setelah-dapat-dana-pen/full&view=ok,* diakses 24 September 2021.

Harnowo, Tri, "Wabah Corona sebagai Alasan *Force Majeur* dalam Perjanjian", *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/,* diakses 19 November 2021.

Harjanto, Setyo Aji, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum", *https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum,* diakses 12 November 2021.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

HHP Lawfirm, "COVID-19 Outbreak: Things to Consider Before Declaring Force Majeure",*https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/04/covid19-outbreak-things-to-consider,* diakses 15 November 2021.

Humas Bungko, "Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa? Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19", *https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/,* diakses 10 November 2021.

Humas Jabar, "Hentikan 11 Proyek Infrastruktur untuk Tangani Pandemi, Ridwan Kamil: Nyawa Warga yang Utama", *https://jabarprov.go.id/index.php/news/42926/2021/07/01/Hentikan-11-Proyek-Infrastruktur-untuk-Tangani-Pandemi-Ridwan-Kamil-Nyawa-Warga-yang-Utama,* diakses 16 November 2021.

Iqbal, Endrik Ahmad, "Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan, Athari: Untuk Sementara!", *https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10901473/jalan-tol-padang-pekanbaru-dihentikan-athari-ditanggungkah-sementara,* diakses 16 November 2021.

Junaidi, Moh., "PLTA Peusangan Aceh Tengah Jadi Klaster COVID-19", *https://beritabaru.co/plta-peusangan-aceh-tengah-jadi-klaster-covid-19/,* diakses 15 November 2021.

JT Asyer Law Firm, "Penerapan Prinsip Keadaan Kahar dalam Hukum Indonesia". *http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar-,* diakses 01 November 2021.

KlikLegal, "Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?", *https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/,* diakses 16 Oktober 2021.

LKPP, "10 Pertanyaan soal Perpres 4 Tahun 2015", *http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/3209,* diakses 18 Oktober 2021.

Medcom.id, "Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan meski Pandemi Covid-19 Melanda", *https://www.medcom.id/foto/grafis/3NO9g7pk-proyek-strategis-nasional-tetap-jalan-meski-pandemi-covid-19-melanda,* diakses 28 November 2021.

Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (PP-IPTEK) Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Perbedaan Endemi, Epidemi, dan Pandemi", *https://ppiptek.brin.go.id/post/read/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi,* diakses 01 November 2021.

Petu, Stevano "DPRD dan Eksekutif Sepakat Tunda Pembayaran Proyek Multi Years", *https://beritakalteng.com/2020/09/15/dprd-dan-eksekutif-sepakat-tunda-pembayaran-proyek-multi-years/,* diakses 16 November 2021.

Praptono, Didiek Dwi, "Sudah Telan Anggaran Rp 6 M, Kelanjutan Proyek BBI di Badung Mangkrak", *https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/dwipa/16/07/2021/sudah-telan-anggaran-rp-6-m-kelanjutan-proyek-bbi-di-badung-mangkrak***,** diakses 16 November 2021.

Putra, Marwendi, "Penanganan Pekerjaan Konstruksi yang Belum Selesai Sampai Akhir Tahun Anggaran", *https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pekerjaan-konstruksi-yang-belum-selesai-sampai-akhir-tahun-anggaran-oleh-marwendi-putra-31-12, diakses 10 Desember 2021.

PWC Indonesia, "Entering H2-2020 Jakarta-Bandung Fast Train Project Has Reach 60% Progress", *https://www.pwc.com/id/en/mediacentre/infrastructure-news/september2020/entering-h2-2020-jakartabandung-fast-trainproject-has-reached-60-percent-progress.html,* diakses 02 September 2021.

Rina, Ratu, "Corona Belum Reda, 50% Pekerja Konstruksi Dipangkas", *https://www.cnbcindonesia.com/news/20200421175057-4-153487/corona-belum-reda-50-pekerja-konstruksi-dipangkas,* diakses 02 September 2021.

Ryan, Janice M., "Interpreting Force Majeure Clauses", *https://www.venable.com/insights/publications/2020/03/interpreting-force-majeure-clauses,* diakses 16 Oktober 2021.

Satriyawan, Denny, "Perubahan Kontrak Tahun Tunggal menjadi Kontrak Tahun Jamak". *https://kppnmetro.org/2020/09/perubahan-kontrak-tahun-tunggal-menjadi-kontrak-tahun-jamak-s-510/,* diakses 24 September 2021.

Sujiastono, R.**,** "Percepatan Proyek Strategis Nasional dengan New Normal", *http://new.widyamataram.ac.id/content/news/percepatan-proyek-strategis-nasional-dengan-new-normal#.YaDVt7IxXv8,* diakses 28 November 2021.

Qur'ani, Hamalatul dan Gunawan, "Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata", *https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata,* diakses 16 Oktober 2021.

Widyaningrum, Gita Laras. "WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global Apa Maksudnya?". https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-Covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya. Diakses 02 September 2021.

Wikipedia, "Keadaan Kahar", *https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar,* diakses 29 Oktober 2021.

Wikipedia, "Pandemi Covid-19 di Indonesia", *https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia,* diakses 23 Oktober 2021.

Wikipedia, "Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia", *https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar_di_Indonesia*, diakses 26 Oktober 2021.

Wikipedia, "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia", *https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia*, diakses 26 Oktober 2021.

Video Youtube

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, "Klinik Pengadaan Podcast : Solusi Permasalahan Kontrak akibat Refocusing & Realokasi Anggaran", *Youtube,* diunggah oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, 26 Juli 2021,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.youtube.com/watch?v=6lnVyRF4Esc, diakses 8 Desember 2021.

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, "Sosialisasi Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2021", *Youtube*, diunggah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, 7 September 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Y0EzQJ6b4Rw, diakses 5 Desember 2021.

LPKN Center, "Webinar Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak", *Youtube*, diunggah oleh LPKN Center, 28 Juli 2020, https://www.youtube.com/watch?v=tK-kgw1agZ8, diakses 10 Desember 2021.

KM BDK Makassar, "KCOC V-Pengendalian Kontrak PBJ Pemerintah dan Pembayarannya dalam rangka Akhir Tahun 2021", 30 November 2021, *Youtube*, diunggah oleh KM BDK Makassar, https://www.youtube.com/watch?v=mw7qgJOtMKg, diakses 10 Desember 2021.

Mudji Santosa, "Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan", *Youtube*, diunggah oleh Mudji Santosa, 13 Mei 2020, https://www.youtube.com/watch?v=-o3sk-u9FrA, diakses 10 Desember 2021.

Mudji Santosa Training and Consulting, "Langkah-langkah Akhir Tahun untuk Pengadaan Tahun Berikutnya dan Penyelesaian Kontrak", *Youtube*, diunggah oleh MS Training and Consulting, 18 November 2020, https://www.youtube.com/watch?v=pOTUlxUcqgU&list=WL&index=57, diakses 20 Desember 2021.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Umdang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 92).

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 62).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran untuk Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 111).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 116 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71050).

Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 61).

Peraturan Bupati Seluma Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 46).

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan serta Pembayaran yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 87).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (BN Tahun 2015 No. 1957).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1610).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK/02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19).

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 119/3039/Sj Nomor 11 Tahun

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia
WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2020 tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 26/SE/M/2020 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 Akibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 16/SE/M/2021 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2013.

Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND- /PB/2020 Tanggal : Agustus 2020 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Kontrak Tahun Tunggal Menjadi Kontrak Tahun Jamak.

Wawancara

Rahmawan Kurniadi, diwawancarai oleh Penulis, 10 Desember 2021, *Zoom Meeting*.

Amri Aulia Nugraha, diwawancarai oleh Penulis, 27 Desember 2021, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.